

Genealogi Konflik Sosial Multisektoral dan Disintegrasi Kultural di Kabupaten Bima : Sebuah Eksplorasi atas Determinan Politik, Ekonomi, dan Geospasial

Syarif^{1*}, Firdaus²

¹ Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Mbojo Bima, Indonesia

² Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Mbojo Bima, Indonesia

Email: syarifahmad1975@gmail.com^{1*}, firddaus08@gmail.com²

Email Korespondensi: syarifahmad1975@gmail.com

Abstract. *This study investigates the genealogy of multisectoral social conflict and cultural disintegration in Bima Regency by examining the interplay of political, economic, socio-cultural, and geospatial determinants. Using a qualitative exploratory-critical method, the research employs content analysis, critical discourse analysis, and spatial conflict mapping based on secondary data from government reports, academic literature, and civil society documentation. The results reveal that social conflict in Bima is not simply driven by unequal access to political and economic resources, but also by structural exclusion, historical marginalization, and the erosion of traditional social values caused by uneven modernization and weak institutional performance. Politically, civil servant bias, the persistence of patronage networks, and minimal civic engagement weaken state legitimacy, public trust, and accountability. Economically, the unequal distribution of natural resources, selective access to government assistance, limited economic diversification, and unresolved agrarian disputes intensify socio-economic inequalities and rural discontent. From a geospatial perspective, the contestation over land, identity, ecological zones, and environmental resources reflects the failure of inclusive and participatory spatial development planning. The study emphasizes that the conflict is systemic, complex, and institutionalized, calling for integrated cross-sectoral policies, inclusive political reforms, and spatially participatory strategies. It advocates for institutional reform, the revitalization of local wisdom and social capital, and the reconstruction of a shared cultural identity to restore long-term social cohesion and resilience. In the context of post-decentralization Indonesia, addressing such deep-rooted, chronic conflicts requires not only strategic policy reorientation but also the empowerment of local communities to play meaningful and active roles in planning, governance, and sustainable development processes. Sustainable peace in Bima hinges on a genuine commitment to social justice, inclusive governance, ecological balance, and the preservation of cultural diversity.*

Keywords: *Agrarian, Conflict, Decentralization, Identity, Participation*

Abstrak. Penelitian ini meneliti silsilah konflik sosial multisektoral dan disintegrasi budaya di Kabupaten Bima dengan meneliti interaksi penentu politik, ekonomi, sosial budaya, dan geospasial. Dengan menggunakan metode eksplorasi kritis kualitatif, penelitian ini menggunakan analisis konten, analisis wacana kritis, dan pemetaan konflik spasial berdasarkan data sekunder dari laporan pemerintah, literatur akademik, dan dokumentasi masyarakat sipil. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa konflik sosial di Bima tidak hanya didorong oleh akses yang tidak merata terhadap sumber daya politik dan ekonomi, tetapi juga oleh pengucilan struktural, marginalisasi historis, dan erosi nilai-nilai sosial tradisional yang disebabkan oleh modernisasi yang tidak merata dan kinerja kelembagaan yang lemah. Secara politik, bias pegawai negeri, kegigihan jaringan patronase, dan keterlibatan sipil yang minimal melemahkan legitimasi negara, kepercayaan publik, dan akuntabilitas. Secara ekonomi, distribusi sumber daya alam yang tidak merata, akses selektif terhadap bantuan pemerintah, diversifikasi ekonomi yang terbatas, dan sengketa agraria yang belum terselesaikan memperkuat ketidaksetaraan sosial-ekonomi dan ketidakpuasan pedesaan. Dari perspektif geospasial, kontestasi atas lahan, identitas, zona ekologis, dan sumber daya lingkungan mencerminkan kegagalan perencanaan pembangunan ruang yang inklusif dan partisipatif. Studi ini menekankan bahwa konflik bersifat sistemik, kompleks, dan dilembagakan, menyerukan kebijakan lintas sektoral yang terintegrasi, reformasi politik inklusif, dan strategi partisipatif secara spasial. Ini mengadvokasi reformasi kelembagaan, revitalisasi kearifan lokal dan modal sosial, dan rekonstruksi identitas budaya bersama untuk memulihkan kohesi dan ketahanan sosial jangka panjang. Dalam konteks Indonesia pasca-desentralisasi, mengatasi konflik kronis yang mengakar seperti itu tidak hanya membutuhkan reorientasi kebijakan strategis tetapi juga pemberdayaan masyarakat lokal untuk memainkan peran yang bermakna dan aktif dalam proses perencanaan, tata kelola, dan pembangunan berkelanjutan. Perdamaian berkelanjutan di Bima bergantung pada komitmen tulus terhadap keadilan sosial, pemerintahan inklusif, keseimbangan ekologis, dan pelestarian keragaman budaya.

Kata kunci: Agraria, Konflik, Desentralisasi, Identitas, Partisipasi

1. PENDAHULUAN

Kabupaten Bima sebagai sebuah entitas geo-administratif di wilayah timur Indonesia tengah mengalami dinamika sosial yang tidak bisa dianggap remeh. Fenomena konflik yang menyebar dalam berbagai ranah kehidupan politik, ekonomi, dan geospasial menunjukkan bahwa struktur sosial di Bima mengalami ketegangan mendalam, baik secara horizontal antarkelompok masyarakat, maupun secara vertikal antara masyarakat dengan negara. Penelusuran genealogi konflik sosial di daerah ini membuka sebuah lanskap kompleksitas yang tidak lagi dapat dijelaskan secara linier dengan paradigma struktural klasik. Sebaliknya, konflik sosial di Bima menandakan adanya fragmentasi nilai, dekonstruksi makna kolektif, dan runtuhnya otoritas norma-norma sosial yang selama ini menjadi pengikat kohesi komunitas (Firmansyah et al., 2023). Kondisi ini dipacu oleh berbagai determinan yang saling bersinggungan, menciptakan fenomena disintegratif yang mengguncang fondasi kultural masyarakat Bima secara signifikan (Houle et al., 2022).

Jika dalam masyarakat tradisional nilai-nilai sosial dan budaya berfungsi sebagai sistem imun kolektif terhadap penetrasi konflik, maka dalam konteks Kabupaten Bima dewasa ini, benteng tersebut tampak keropos. Penyebab utamanya adalah penetrasi masif dari kemajuan teknologi informasi yang tidak disertai dengan kemampuan literasi digital dan budaya politik masyarakat yang memadai. Generasi muda mengalami disorientasi identitas dan krisis referensi moral yang pada gilirannya menjadikan mereka rentan terhadap narasi-narasi sektarian dan politik identitas. Dalam konfigurasi ini, benturan antar nilai global dan lokal bukan sekadar wacana, tetapi sudah merembes ke dalam tindakan nyata yang mewujudkan dalam bentuk konflik horizontal antar kelompok sosial, bahkan bereskalasi menjadi konflik kekerasan berbasis simbolik dan material (Hadzi-Vaskov et al., 2023).

Konflik sosial di Bima pasca-Orde Baru telah menunjukkan transformasi karakteristik. Dari yang semula dianggap sebagai ekspresi euforia atas kebebasan politik dan demokratisasi, kini berkembang menjadi ekspresi kekerasan yang sistemik dan nyaris dianggap sebagai mekanisme resolusi utama dalam menghadapi konflik kepentingan. Bahkan, demonstrasi dan blokade jalan telah menjadi praktik umum yang dilegitimasi secara sosial, sebagai respons atas tidak responsifnya institusi negara terhadap kebutuhan publik. Dalam konteks ini, negara bukan hanya absen secara fungsional, tetapi justru menjadi sumber konflik itu sendiri, melalui kebijakan yang tidak adil, ketidaknetralan aparat dalam politik elektoral, hingga kegagalan menghadirkan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan inklusif (Peranginangin & Budiarti, 2024).

Aspek ekonomi menambah lapisan kerentanan yang lebih dalam dalam struktur sosial masyarakat Bima. Kesenjangan sosial-ekonomi yang akut, ketimpangan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, serta sumber daya ekonomi menjadi latar determinan yang melanggengkan eksklusi dan marginalisasi kelompok tertentu. Dalam narasi konflik kontemporer, kemiskinan di Bima bukan sekadar kondisi statistik, tetapi telah berubah menjadi bentuk kekerasan struktural yang sistematis. Ketika masyarakat miskin merasa kehilangan suara dan ruang dalam proses pembangunan, maka ruang tersebut diambil alih oleh protes, kekerasan kolektif, dan dalam beberapa kasus, konflik yang berbasis komodifikasi penderitaan. Ini menjadi paradoks ketika desentralisasi dan otonomi daerah justru tidak berhasil meredistribusikan keadilan sosial, tetapi malah memperdalam disparitas antar wilayah dalam kabupaten itu sendiri (Imran, 2019).

Tak kalah genting adalah dimensi geospasial yang memainkan peran krusial dalam membentuk medan konflik di Kabupaten Bima. Ketidakjelasan batas administratif antar desa dan kecamatan, konflik pemekaran wilayah, serta pertentangan klaim atas sumber daya alam menjadi faktor-faktor laten yang memperbesar peluang konflik. Keberadaan masyarakat adat yang selama ini mengelola tanah secara komunal, kini berhadapan dengan ekspansi kapitalisme ekstraktif dan logika negara yang berbasis penguasaan. Dalam situasi seperti ini, konflik bukan lagi hanya konflik antar manusia, tetapi juga konflik atas ruang, identitas, dan masa depan ekologis. Persoalan ruang laut dan pesisir, eksploitasi hasil hutan, serta perubahan iklim yang memengaruhi sistem pertanian juga menjadi pemantik konflik geospasial yang multi-lapisan (Kosim, 2012).

Konflik sosial di Bima juga memiliki karakteristik multi-aktor dan multi-sektor. Pemerintah, masyarakat sipil, dan pelaku ekonomi saling bersinggungan dalam arena konflik yang tumpang tindih. Ketika negara gagal menjalankan fungsi regulatif dan distributifnya, pelaku ekonomi mengambil alih kendali atas sumber daya, sementara masyarakat sipil—terutama kelompok rentan seperti petani, nelayan, perempuan, dan pemuda—menjadi entitas yang terdorong ke pinggiran. Tidak mengherankan jika sebagian besar konflik di Bima berakar pada perasaan tidak adil terhadap distribusi sumber daya dan akses terhadap keputusan-keputusan politik dan ekonomi. Disinilah letak krisis legitimasi sosial dan moral negara di mata warganya (Hefni, 2018).

Dalam lanskap konflik yang sedemikian rumit, disintegrasi kultural menjadi fenomena yang tidak terelakkan. Nilai-nilai gotong royong, solidaritas, dan penghormatan terhadap struktur adat dan norma sosial mengalami erosi signifikan. Proses dekapitalisasi modal sosial ini ditandai oleh hilangnya kepercayaan antar kelompok, rusaknya jaringan sosial,

serta melemahnya kepatuhan terhadap tatanan sosial yang sebelumnya menjadi perekat kolektif. Ini adalah bentuk paling subtil dari konflik, yakni ketika masyarakat mengalami kehancuran moral dan identitas kolektif. Dalam kerangka ini, disintegrasi kultural bukan sekadar akibat dari konflik sosial, tetapi justru menjadi prasyarat bagi munculnya konflik yang lebih luas dan destruktif (Suryawan, 2019).

Menariknya, studi ini juga menunjukkan bahwa konflik sosial di Bima tidak hanya hadir dalam bentuk yang kasat mata, seperti demonstrasi atau kekerasan fisik, tetapi juga dalam bentuk kekerasan simbolik melalui bahasa, narasi, dan representasi. Diskursus tentang siapa yang "berhak" atas tanah, siapa yang "autentik" sebagai warga, dan siapa yang "pantang" dilibatkan dalam pengambilan keputusan menjadi medan pertempuran naratif yang tidak kalah mematikan. Narasi dominan tentang pembangunan dan modernisasi seringkali mengabaikan eksistensi lokalitas dan kebudayaan komunitas, sehingga menciptakan relasi kuasa yang timpang antara pusat dan pinggiran, antara negara dan warga, antara penguasa dan yang dikuasai (Aan Budianto, 2024).

Dalam konteks reformasi politik nasional, Kabupaten Bima sebenarnya memiliki peluang besar untuk mengelola konflik secara lebih demokratis dan partisipatif. Namun, peluang tersebut seringkali gagal dimanfaatkan karena lemahnya institusi pemerintahan lokal, rendahnya kapasitas partai politik dalam mendidik warga, serta dominasi praktik-praktik politik transaksional yang menjadikan masyarakat sebagai objek manipulasi elektoral. Demokrasi prosedural tanpa demokrasi substantif justru memperpanjang rantai konflik karena menciptakan ekspektasi yang tidak pernah terpenuhi. Dalam kerangka inilah perlu dirumuskan model intervensi sosial-politik yang mampu menjembatani kepentingan antar aktor dan memulihkan kepercayaan sosial secara struktural (Januari et al., 2024).

Kerentanan konflik di Kabupaten Bima akan terus bereskalasi jika tidak ditangani melalui pendekatan multi-level dan lintas sektoral. Kajian ini merekomendasikan pendekatan intervensi strategis berbasis pemetaan konflik yang komprehensif dan partisipatif, sebagaimana tertuang dalam kerangka Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada respons cepat terhadap konflik manifes, tetapi lebih pada pembangunan sistem deteksi dini, penguatan nilai-nilai 4 konsensus kebangsaan, serta revitalisasi pranata sosial lokal yang masih hidup di tengah komunitas. Intervensi demikian akan lebih efektif jika melibatkan seluruh elemen: negara, masyarakat sipil, dan sektor swasta dalam kerangka tata kelola konflik yang inklusif dan berkelanjutan (Huda, 2023).

Model intervensi kebijakan yang ditawarkan tidak cukup hanya pada tataran normatif, tetapi harus menyentuh aspek rekonsiliasi sosial, pemulihan psikososial pasca-konflik, dan penyusunan ulang relasi kuasa di tingkat komunitas. Kabupaten Bima membutuhkan forum mediasi permanen yang bersifat deliberatif, yang mampu mempertemukan berbagai narasi dan kepentingan dalam satu meja dialog. Selain itu, penguatan kapasitas aktor lokal dalam mediasi, penyelesaian sengketa, dan advokasi hak masyarakat adat harus menjadi prioritas dalam agenda pembangunan sosial di Bima. Reformasi institusional dan rekonstruksi identitas sosial adalah dua prasyarat mutlak dalam membangun tata kehidupan masyarakat yang lebih damai, adil, dan berkelanjutan.

Urgensi dan kebaruan riset ini terletak pada upaya komprehensif untuk mengurai dinamika konflik sosial di Kabupaten Bima yang selama ini dipahami secara sempit sebagai gejala pascareformasi semata, padahal realitasnya jauh lebih kompleks, mencakup multilayer faktor politik, ekonomi, geografis, dan budaya yang saling berkelindan dalam konstruksi konflik manifes maupun laten. Dalam konteks disrupsi teknologi dan euforia demokrasi pasca-Orde Baru, konflik tak lagi sekadar persoalan elite versus rakyat, tetapi telah bermetamorfosis menjadi benturan kepentingan antarkomunitas, pemangku otoritas, hingga pelaku ekonomi dalam perebutan akses, identitas, dan legitimasi terhadap sumber daya sosial dan geografis. Kebaruan riset ini tampak dari pendekatan konten analitik berbasis data sekunder yang diinterpretasikan secara mendalam (*depth interpretation*) untuk memetakan bukan hanya bentuk konflik, tetapi juga faktor determinannya, dalam kerangka konflik terinstitusionalisasi maupun konflik destruktif. Dalam derajat tertentu, penelitian ini mampu menyingkap aspek “dekapitalisasi modal sosial” berupa hilangnya trust, kohesi sosial, dan norma kolektif yang tak kasatmata namun amat signifikan dalam memperparah eskalasi konflik. Inilah yang menjadikan riset ini sangat relevan dan bernilai tinggi dalam kerangka desain kebijakan resolusi konflik lokal yang berbasis data dan kontekstualisasi sosial.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain eksploratif-kritis yang menekankan pada *genealogical tracing* atas jejak historis konflik, serta eksplorasi hermeneutik atas determinan struktural dan spasial. Pendekatan ini bersifat multidimensional dan transdisipliner, menggabungkan metode *content analysis*, *critical discourse analysis* (CDA), serta pemetaan konflik spasial berbasis data sekunder. Pendekatan ini memungkinkan pembacaan ulang terhadap dokumen, arsip, dan laporan konflik (baik pemerintah, NGO, maupun media lokal) sebagai narasi sosial yang menyingkap relasi kuasa tersembunyi dalam

dinamika konflik sektoral dan kultural di Bima. Teknik analisis yang digunakan bersifat *content-interpretative*, di mana peliputan, prediksi, evaluasi, dan rekomendasi terhadap konflik sosial tidak hanya dilihat dari angka-angka statistik, tetapi dari artikulasi sosial yang terekam dalam bentuk ketimpangan distribusi sumber daya, narasi eksklusi sosial, serta konflik identitas berbasis topografi dan etnospasial. Penelitian ini juga memanfaatkan *geospatial-conflict mapping* untuk menandai keterhubungan antara kontestasi ruang dengan disintegrasi nilai budaya lokal sebagai akibat modernisasi yang tidakimbang. Dalam kerangka teoritik, pendekatan ini meminjam konstruksi teori konflik Marxian, teori arena sosial Coser, serta konsep postkolonial atas disintegrasi kultural yang dipicu oleh desentralisasi tanpa kontrol sosial.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Determinan Politik dan Ekonomi

Genealogi konflik sosial di Kabupaten Bima menggambarkan sebuah lanskap relasi kuasa dan eksklusi yang menahun, yang berakar pada kegagalan sistemik dalam mendistribusikan akses dan pengaruh di dalam masyarakat secara adil. Dinamika konflik ini tidak lahir dalam ruang kosong, melainkan merupakan produk dari ketimpangan historis yang direproduksi melalui institusi politik yang tidak inklusif dan sistem ekonomi yang timpang. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam konteks politik lokal, konflik bukan semata hasil pertentangan elite atau kompetisi elektoral, tetapi terhubung erat dengan rendahnya tingkat literasi politik warga, absennya pendidikan kewarganegaraan kritis, dan meluasnya praktik patronase yang membuat masyarakat terjebak dalam politik transaksional. Fenomena ini membentuk medan konflik yang bukan hanya politis tetapi juga bersifat struktural, memperkuat disintegrasi sosial dan kultural di kalangan masyarakat bawah yang kian tercerabut dari nilai-nilai komunalnya (Firmansyah et al., 2023).

Dalam studi ini terungkap bahwa salah satu sumber ketegangan utama adalah keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam politik praktis, yang tidak saja menurunkan kepercayaan publik terhadap netralitas birokrasi, tetapi juga memperkuat sentimen sektarian antarpendingkal calon kontestan politik. Pada titik inilah konflik politik berkembang dari sekadar diferensiasi preferensi menjadi segmentasi sosial yang akut, di mana masyarakat tidak lagi melihat negara sebagai fasilitator keadilan, melainkan sebagai aktor yang partisan. Kurangnya komitmen terhadap prinsip *good governance* dan *clean government* menciptakan ruang-ruang kekuasaan informal yang dikuasai elite lokal, memperlemah legitimasi institusi

publik, serta menyuburkan aksi-aksi perlawanan horizontal yang kerap diekspresikan dalam bentuk pemblokiran jalan dan protes anarkis.

Terdapat korelasi langsung antara derajat keterbukaan politik dan intensitas konflik, yang dalam konteks Kabupaten Bima, justru mengalami distorsi dalam bentuk euforia demokrasi tanpa kontrol institusional. Fenomena ini terlihat jelas dalam perhelatan Pilkada maupun Pilkades, yang bukan hanya menjadi ajang kompetisi elektoral, tetapi juga medium reproduksi konflik berbasis identitas. Praktik politik uang (*money politics*) menjadi patron utama dalam mobilisasi massa, yang mengaburkan rasionalitas pemilih dan memperkuat politik balas budi. Dalam konteks ini, konflik tidak lagi hadir sebagai ekspresi perbedaan aspirasi, melainkan sebagai arena legitimasi kuasa berbasis kapital yang meminggirkan partisipasi politik substantif.

Kondisi politik lokal yang demikian rapuh menimbulkan siklus kekerasan sosial yang terinstitusionalisasi. Masyarakat cenderung menjadikan konflik sebagai kanal penyelesaian masalah akibat absennya responsifitas pemerintah. Fenomena pemblokiran jalan oleh warga bukan sekadar bentuk protes atas kebijakan publik yang tidak berpihak, tetapi telah menjadi ekspresi frustrasi kolektif terhadap sistem yang tidak mampu menyelesaikan kebutuhan dasar rakyat. Ini menunjukkan bahwa determinan politik dalam konflik sosial di Kabupaten Bima tidak dapat dilihat sebagai faktor otonom, melainkan sangat berkait dengan ekonomi politik ketimpangan dan eksklusi sistemik.

Pada ranah ekonomi, determinan konflik sosial tidak kalah kompleks. Ketimpangan distribusi sumber daya dan akses ekonomi melahirkan perasaan ketidakadilan yang dalam. Kemiskinan struktural yang mengakar di daerah pedesaan dan kawasan terpencil menimbulkan kesenjangan sosial yang kian melebar, bukan hanya antara desa dan kota, tetapi juga antar kelompok sosial dalam satu komunitas. Data menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di Kabupaten Bima yang mencapai lebih dari 14% pada tahun 2023 merupakan refleksi kegagalan kebijakan redistributif yang adil. Dalam kondisi ini, konflik sosial tidak hanya dipicu oleh kelangkaan ekonomi, tetapi juga oleh ekspektasi yang tidak terpenuhi akibat janji-janji pembangunan yang gagal diwujudkan.

Rasa eksklusi sosial yang dialami oleh masyarakat marginal semakin diperparah oleh terbatasnya akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan. Ketika warga miskin tidak memiliki kesempatan untuk meningkatkan kapasitas diri, maka terjadi stagnasi sosial yang menciptakan frustrasi laten. Dalam situasi seperti ini, rasa tidak puas dengan struktur sosial yang ada mudah berubah menjadi tindakan kolektif yang destruktif. Keterbatasan pendidikan tidak hanya menciptakan ketidaksetaraan ekonomi, tetapi juga memperlemah kohesi sosial dan

memutus jejaring solidaritas horizontal antarwarga. Penelitian ini menemukan bahwa ketegangan antara kelompok masyarakat yang memiliki akses dan yang termarginalkan menjadi benih konflik yang berulang dalam banyak kasus.

Distribusi infrastruktur dan layanan publik juga menjadi titik krusial dalam determinasi konflik ekonomi di Kabupaten Bima. Ketimpangan pembangunan antara wilayah pusat dan pinggiran menciptakan persepsi ketidakadilan yang akut. Akses terhadap air bersih, pendidikan berkualitas, serta fasilitas kesehatan masih sangat terbatas di banyak desa terpencil, yang secara sosiologis menciptakan stratifikasi ruang berdasarkan ketersediaan layanan dasar. Dalam konteks seperti ini, pembangunan yang bersifat sentralistik tanpa partisipasi masyarakat lokal hanya akan menambah resistensi terhadap negara, yang pada akhirnya memicu konflik sosial sebagai bentuk reaksi terhadap marginalisasi kebijakan.

Pengelolaan sumber daya alam yang tidak berkeadilan menjadi salah satu determinan konflik paling serius di Kabupaten Bima. Ketiadaan regulasi yang melindungi hak masyarakat lokal atas tanah dan sumber daya menciptakan ketegangan antara masyarakat adat dan aktor-aktor ekonomi seperti perusahaan tambang, investor pariwisata, dan elite pemilik modal. Konflik agraria yang terjadi di kawasan perbatasan desa merupakan refleksi konkret dari tarik-menarik kepentingan antara hak adat dan komersialisasi ruang hidup. Ketika masyarakat merasa terancam kehilangan hak atas tanah yang diwariskan secara turun temurun, maka reaksi kolektif berupa protes, pengusiran, dan benturan fisik menjadi keniscayaan yang sulit dihindari.

Salah satu bentuk eksklusi ekonomi yang menonjol adalah kegagalan program-program bantuan sosial dalam menjangkau sasaran yang tepat. Praktik manipulasi data penerima bantuan seperti Raskin, BLT, dan Askin sering kali digunakan oleh elite lokal untuk memperkuat basis kekuasaan politik mereka. Akibatnya, bantuan yang seharusnya menyentuh kelompok miskin justru menjadi sumber kecemburuan dan konflik antarwarga. Dalam banyak kasus, konflik horizontal yang timbul dari distribusi bantuan menjadi contoh nyata bagaimana kesenjangan akses terhadap sumber daya negara bisa merusak tatanan sosial dan menimbulkan disintegrasi kultural yang mendalam.

Konflik ekonomi juga berakar pada ketidaksinkronan antara perencanaan pembangunan dan kebutuhan riil masyarakat. Banyak program pembangunan yang bersifat top-down tanpa mempertimbangkan konteks lokal, sehingga tidak mampu menjawab tantangan struktural kemiskinan dan pengangguran. Masyarakat yang tidak dilibatkan dalam perumusan kebijakan akhirnya merasa tidak memiliki kontrol terhadap nasibnya sendiri. Ketika partisipasi hilang, maka protes dan resistensi menjadi pilihan. Inilah akar dari banyak konflik sosial di

Kabupaten Bima yang bermula dari proyek-proyek pembangunan yang dianggap tidak transparan, tidak akuntabel, dan tidak berpihak.

Dalam analisis struktural, konflik ekonomi di Kabupaten Bima tidak semata disebabkan oleh kekurangan sumber daya, tetapi juga oleh kesenjangan distribusi kekuasaan yang melandasi kebijakan ekonomi. Ketika elite lokal menguasai akses terhadap modal, informasi, dan pengaruh, sementara mayoritas masyarakat berada dalam posisi subordinat, maka lahirlah sistem ekonomi yang oligarkis dan tidak adil. Dalam situasi demikian, mobilisasi sosial bukan hanya sebuah protes terhadap ketimpangan ekonomi, tetapi juga ekspresi politik dari penolakan terhadap struktur kekuasaan yang eksklusif. Ini menjadi penting dalam memahami mengapa konflik sosial di Bima sering kali menargetkan simbol-simbol negara seperti kantor pemerintahan, aparat desa, dan fasilitas publik.

Krisis kepercayaan terhadap institusi ekonomi dan politik yang terjadi di Kabupaten Bima merefleksikan gejala disintegrasi kultural yang mengakar. Nilai-nilai sosial seperti gotong royong, toleransi, dan musyawarah mulai digantikan oleh logika transaksional dan kompetisi destruktif. Ketika masyarakat tidak lagi percaya bahwa norma kolektif bisa menjadi dasar kehidupan bersama, maka norma kekerasan menjadi jalan pintas untuk menyelesaikan konflik. Disintegrasi ini tidak hanya terlihat pada tingkat hubungan antarindividu, tetapi juga dalam melemahnya kepercayaan horizontal antarwarga, yang secara tidak langsung memperparah fragmentasi sosial.

Penelitian ini juga menemukan bahwa konflik sosial tidak terlepas dari dinamika ekonomi-politik nasional yang ikut mempengaruhi arah pembangunan daerah. Desentralisasi dan otonomi daerah yang pada awalnya diharapkan membawa perubahan positif, ternyata dalam praktiknya justru memperbesar potensi konflik ketika kewenangan tidak dibarengi dengan akuntabilitas. Pemerintah daerah sering kali terjebak dalam jaringan kepentingan yang memperlemah kapasitasnya untuk menyelesaikan masalah struktural. Akibatnya, konflik sosial yang terjadi di akar rumput tidak mendapatkan perhatian yang memadai dan cenderung dibiarkan membesar hingga menjadi krisis yang memerlukan intervensi keamanan.

Genealogi konflik sosial di Kabupaten Bima adalah refleksi dari sebuah masyarakat yang terjebak dalam relasi kuasa yang tidak setara, baik secara politik maupun ekonomi. Ketidakadilan, eksklusi, dan marginalisasi bukan hanya bersifat material, tetapi juga kultural. Ketika masyarakat kehilangan rasa memiliki terhadap sistem sosial-politik, maka identitas kolektif pun mulai tergerus. Dalam konteks ini, konflik tidak bisa lagi dilihat sebagai insiden sporadis, tetapi sebagai bagian dari struktur sosial yang disfungsional. Ketika kekuasaan hanya

dinikmati oleh segelintir kelompok, maka konflik menjadi bahasa perlawanan dari mereka yang terpinggirkan.

Dengan demikian, temuan penelitian ini secara eksplisit menunjukkan bahwa konflik sosial multisektoral di Kabupaten Bima tidak bisa dipahami secara parsial. Determinan politik dan ekonomi tidak bekerja dalam ruang hampa, tetapi saling berkait dan memperkuat satu sama lain dalam membentuk arsitektur ketegangan sosial yang kompleks. Konflik tidak hadir sebagai anomali, melainkan sebagai ekspresi sistemik dari ketimpangan struktural yang telah berlangsung lama.

Determinan Geospasial

Struktur geomorfologi Kabupaten Bima yang meliputi daerah pesisir, dataran rendah, serta pegunungan menyebabkan distribusi infrastruktur publik dan aksesibilitas layanan dasar menjadi tidak merata. Masyarakat yang mendiami wilayah pegunungan dan daerah terisolasi seperti Lambitu, Parado, atau Donggo menghadapi hambatan struktural dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan jaringan transportasi. Ketimpangan spasial tersebut menumbuhkan persepsi ketidakadilan pembangunan yang melahirkan sentimen marginalisasi geospasial. Dalam konteks ini, ruang bukan sekadar latar geografis, tetapi juga arena kompetisi akses, kontrol, dan distribusi nilai ekonomi yang direproduksi oleh institusi-institusi negara maupun pelaku ekonomi dominan.

Ketegangan antar wilayah administratif di Kabupaten Bima juga ditopang oleh struktur ekologi konflik yang semakin tegang akibat eksploitasi sumber daya alam yang tidak melibatkan partisipasi deliberatif dari masyarakat lokal. Beberapa lahan hutan dan kawasan potensial mineral telah dikonversi menjadi wilayah konsesi perusahaan besar, yang menginterupsi sistem sosial-ekologis masyarakat adat dan lokal yang selama ini memiliki sistem pengelolaan berbasis kearifan lokal. Akumulasi kekecewaan terhadap hilangnya kontrol terhadap tanah dan hutan, serta absennya pengakuan terhadap hak ulayat, memperkuat basis resistensi yang pada beberapa titik mewujud dalam bentuk aksi kolektif sporadis dan insiden kekerasan terbuka.

Kondisi keruangan Kabupaten Bima sebagai daerah rawan bencana turut menjadi determinan konflik yang signifikan. Distribusi bantuan pascabencana yang timpang dan proses relokasi yang minim komunikasi partisipatif melahirkan distrust yang akut terhadap otoritas. Di wilayah seperti Madapangga dan Soromandi yang acapkali terdampak banjir dan tanah longsor, tidak sedikit kelompok masyarakat yang merasa diabaikan oleh perangkat birokrasi pascabencana. Ketika kesenjangan spasial ini dibiarkan dan tidak disertai dengan sistem

mitigasi partisipatif berbasis lokalitas, maka ruang-ruang pascabencana berpotensi menjadi trigger baru konflik sosial terutama dalam hal klaim pemukiman kembali dan akses terhadap lahan pengganti.

Geopolitik pesisir di Kabupaten Bima menjadi medan konflik baru yang diwarnai oleh persaingan antara nelayan tradisional dengan entitas industri perikanan besar, serta antara masyarakat pesisir dengan sektor pariwisata eksploitatif. Terjadi friksi spasial akibat perebutan ruang laut dan degradasi ekosistem seperti terumbu karang dan hutan mangrove, yang selama ini menjadi basis ekonomi subsisten nelayan lokal. Praktik pembangunan pariwisata yang tidak inklusif serta kegiatan reklamasi pantai yang destruktif terhadap ekosistem pesisir memunculkan resistensi dari masyarakat pesisir. Benturan spasial antara lokalitas ekonomi rakyat dan eksklusi struktural oleh kapitalisme pesisir menjadi dinamika laten yang mendistorsi stabilitas sosial komunitas maritim.

Dinamika pertanian di daerah agraris seperti Kabupaten Bima juga dipengaruhi oleh perubahan iklim global yang berdampak pada pola tanam, degradasi kualitas tanah, serta akses terhadap air irigasi. Ketika ketidakpastian ekologis ini tidak ditanggulangi melalui sistem irigasi cerdas dan adil, maka persaingan antarpetani dalam memperebutkan akses air atau lahan menjadi tidak terhindarkan. Terdapat potensi konflik agraria yang tidak saja bersumber dari luar (perusahaan atau negara), tetapi juga dari dalam komunitas agraris sendiri. Di titik ini, perubahan iklim bukan hanya problem ekologi, melainkan juga detonan spasial atas ketegangan sosial horizontal antar sesama petani.

Masalah tapal batas desa atau kecamatan tidak semata bersifat teknokratis administratif. Ia telah menjadi locus utama konflik karena berimplikasi langsung terhadap klaim atas Dana Desa, PAD, dan legitimasi atas ruang eksploitasi sumber daya. Lemahnya institusionalisasi batas wilayah menyebabkan timbulnya ketidakpastian yurisdiksi, sehingga kerap terjadi dualisme klaim antara desa yang bersebelahan. Absennya peta batas resmi yang diakui secara legal dan partisipatif menyebabkan eskalasi konflik administratif dapat berubah menjadi konflik horizontal yang berujung pada disintegrasi sosial, sebagaimana tercermin dalam benturan antar masyarakat desa dalam konteks persaingan perolehan proyek dan dana pembangunan.

Ketimpangan dalam pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air bersih, dan sekolah menimbulkan ketegangan antarwilayah. Wilayah yang terakses pembangunan, umumnya daerah dataran rendah dan dekat pusat kota, mengalami akselerasi ekonomi dan mobilitas sosial, sedangkan daerah terpencil dan pegunungan tertinggal dalam hal fasilitas dan kesempatan. Pola ini menciptakan hierarki spasial yang memperkuat sentimen eksklusi

teritorial. Warga daerah tertinggal tidak hanya merasa tersisih dari pembangunan, melainkan juga dari proses representasi politik dan prioritas anggaran. Ketika pembangunan bersifat selektif spasial, maka ruang menjadi alat penguatan segregasi sosial dan bukan integrasi wilayah.

Geospasialitas konflik di Bima juga tercermin dari ketegangan atas proyek-proyek strategis daerah yang bersentuhan dengan kawasan adat atau konservasi ekologis. Beberapa pembangunan bendungan, tambang, dan perluasan lahan pertanian modern sering kali menyasar wilayah-wilayah yang selama ini menjadi ruang hidup komunitas adat atau petani tradisional. Ketika proyek tersebut tidak menyertakan proses AMDAL yang partisipatif atau mekanisme konsultasi publik yang substantif, maka proyek pembangunan justru menjadi sumber konflik struktural. Perluasan modernisasi spasial yang bersifat top-down sering kali menciptakan eksklusi ekologis dan ekspulsi penduduk asli dari ruang penghidupan mereka.

Distribusi geospasial pendidikan juga menunjukkan pola yang tidak merata di Kabupaten Bima. Sekolah-sekolah unggulan dan fasilitas pendidikan modern terkonsentrasi di daerah pusat kota, sementara desa-desa terpencil kekurangan guru, fasilitas belajar, dan akses teknologi informasi. Ketimpangan ini menciptakan dualisme generasi: satu kelompok dengan akses dan mobilitas sosial yang tinggi, dan kelompok lain yang stagnan dalam lingkaran ketertinggalan. Ketika eksklusi spasial terhadap pendidikan terus berlangsung, ia menciptakan basis struktural bagi konflik antargenerasi dan ketidakpercayaan terhadap negara sebagai penyedia layanan dasar yang adil.

Dalam banyak kasus, konflik geospasial juga terjadi dalam konteks klaim warisan tanah leluhur yang tidak tercatat secara legal formal, tetapi memiliki legitimasi sosial kuat. Di Kabupaten Bima, tanah-tanah adat atau tanah garapan komunal sering kali diklaim oleh korporasi atau program negara tanpa konsensus masyarakat pemilik sejarah atas tanah tersebut. Ketika sistem hukum positif tidak mengakomodasi pengetahuan lokal tentang kepemilikan ruang, maka konflik antara masyarakat dan negara menjadi tidak terhindarkan. Di sinilah ruang menjadi medan pertarungan antara logika legal formal dan logika kultural-lokal yang saling berseberangan.

Keragaman geospasial Kabupaten Bima juga menjadikan konflik bersifat heterogen, bergantung pada tipologi ruang dan konfigurasi sosiokultural yang melingkupinya. Di daerah pegunungan, konflik lebih sering berupa klaim atas hutan, lahan, dan tapal batas. Di daerah pesisir, konflik berkisar pada akses sumber daya laut dan konservasi ekosistem. Sedangkan di wilayah urban dan peri-urban, konflik muncul akibat pemekaran kota, gentrifikasi, dan proyek infrastruktur yang menggusur permukiman warga miskin. Setiap ruang memiliki potensi

konflik yang khas, namun semuanya terkait dalam jaringan spasial yang saling terhubung dan tak dapat dilihat secara terpisah.

Ketiadaan sistem geospasial yang terintegrasi dan partisipatif menyebabkan kebijakan pembangunan di Bima seringkali tidak berbasis data spasial yang akurat dan tidak kontekstual. Perencanaan tata ruang cenderung top-down dan tidak mempertimbangkan kerentanan konflik sosial dalam kerangka spasial. Ketika ruang diperlakukan secara abstrak dalam perencanaan, sementara pada tataran praksis ruang adalah locus relasi sosial yang dinamis, maka intervensi kebijakan akan selalu berisiko menciptakan ekspos konflik yang tidak terdeteksi. Hal ini menunjukkan pentingnya integrasi GIS, peta konflik, dan partisipasi komunitas dalam menyusun peta risiko konflik berbasis spasial (Houle et al., 2022).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan kompleksitas analitis yang dikonstruksi dari determinan politik, ekonomi, dan geospasial dalam kajian genealogi konflik sosial di Kabupaten Bima, dapat disimpulkan bahwa konflik yang terjadi tidak bersifat insidental maupun sporadis, melainkan merupakan manifestasi sistemik dari akumulasi ketimpangan struktural, disorientasi kultural, serta marginalisasi spasial yang berlangsung secara historis dan berlapis. Fenomena ini memperlihatkan sebuah model konflik multisektoral yang ditandai oleh keterlibatan aktor lintas bidang dalam arena kontestasi sumber daya, identitas, dan otoritas naratif, sehingga melahirkan disintegrasi nilai-nilai kolektif sebagai fondasi kohesi sosial masyarakat. Dalam kerangka teoritis yang dipengaruhi oleh sintesis Marxian-Coserian hingga postkolonial, penelitian ini membongkar mekanisme reproduksi konflik berbasis patronase politik, oligarki ekonomi, dan eksklusivitas geospasial yang melemahkan institusi lokal serta menghancurkan struktur sosial berbasis kepercayaan. Disintegrasi ini menjelma dalam bentuk hilangnya modal sosial, munculnya resistensi simbolik dan material, serta meningkatnya kekerasan sebagai kanal ekspresi ketidakadilan. Dengan demikian, solusi yang ditawarkan tidak cukup sebatas teknokratik, melainkan menuntut rekonstruksi relasi kuasa, mediasi deliberatif antar aktor, dan revitalisasi pranata sosial lokal sebagai prasyarat menuju stabilitas sosial-politik yang berkelanjutan dan berkeadilan.

REFERENSI

- Aan Budianto. (2024). Genealogi moderasi beragama pada masyarakat transmigran Jawa dan Bali dengan penduduk asli di Lampung Tengah tahun 1950–1998. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 14, 174.
- Champ, T. M., Lee, S., Martin, A. B., Bolles, C. M., Kim, S. W., & Gothard, K. M. (2022). Social engagement revealed by gaze following in third-party observers of simulated social conflict. *Frontiers in Psychology*, 13, 952390. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.952390>
- Dennison, J., & Geddes, A. (2021). Thinking globally about attitudes to immigration: Concerns about social conflict, economic competition and cultural threat. *The Political Quarterly*, 92(3), 541–551. <https://doi.org/10.1111/1467-923X.12984>
- Faizin, B., Fitri, S. A., Maylawati, D. S. A., Rizqullah, N., & Ramdhani, M. A. (2025). Polarization of religious issues in Indonesia's social media society and its impact on social conflict. *Journal of Applied Data Sciences*, 6(1), 426–442.
- Firmansyah, E., Anwar, S., & Khozin, K. (2023). Anthropological approach to Islamic education: Establishing noble spirituality in overcoming social conflict. *Al-Hayat: Journal of Islamic Education*, 7(1), 163. <https://doi.org/10.35723/ajie.v7i1.374>
- Gizelis, T. I., Pickering, S., & Urdal, H. (2021). Conflict on the urban fringe: Urbanization, environmental stress, and urban unrest in Africa. *Political Geography*, 86, 102357. <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2021.102357>
- Hadzi-Vaskov, M., Pienknagura, S., & Ricci, L. A. (2023). The macroeconomic impact of social unrest. *B.E. Journal of Macroeconomics*, 23(2), 917–958. <https://doi.org/10.1515/bejm-2022-0039>
- Hammar, R., Samangun, C., Malik, Y., & Laturmas, A. (2021). Spatial planning for indigenous law communities to solve social conflict resolution in West Papua Indonesia. *Journal of Social Studies Education Research*, 12(4), 405–423.
- Hefni, W. (2018). Genealogi studi hukum Islam di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Indonesia. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 13(1), 226. <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v13i1.1788>
- Houle, C., Ruck, D. J., Bentley, R. A., & Gavrillets, S. (2022). Inequality between identity groups and social unrest. *Journal of the Royal Society Interface*, 19(188). <https://doi.org/10.1098/rsif.2021.0725>
- Huda, A. N. (2023). Genealogi dan perkembangan sektarianisme dalam Islam. *SAFINA: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 8(2), 13–22.
- Imran. (2019). Bissu, genealogi dan tegangannya dengan Islam. *Mimikri*, 5(1), 102.
- Januari, N., Hakim, B. R., Rahman, F., Syarif, U. I. N., & Jakarta, H. (2024). Genealogi tarekat Neosufi di Indonesia: Dari ritual eksklusif ke aksi sosial kolektif. *Dengan*, 4(1),
- Kosim, M. (2012). Kyai and blater (local elite in Madurese society). *Karsa: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman*, 12(2), 150–160.
- Kwok, J. Y. Y., Choi, E. P. H., Wong, J. Y. H., Lok, K. Y. W., Ho, M. H., Fong, D. Y. T., ... & Auyeung, M. (2023). A randomized clinical trial of mindfulness meditation versus exercise in Parkinson's disease during social unrest. *NPJ Parkinson's Disease*, 9(1), 7. <https://doi.org/10.1038/s41531-022-00415-y>

- Lee, M., Kolkmeier, J., Heylen, D., & IJsselsteijn, W. (2021). Who makes your heart beat? What makes you sweat? Social conflict in virtual reality for educators. *Frontiers in Psychology*, 12, 628246. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.628246>
- Mukherjee, U. K., Bagozzi, B. E., & Chatterjee, S. (2023). A Bayesian framework for studying climate anomalies and social conflicts. *Environmetrics*, 34(2), e2778. <https://doi.org/10.1002/env.2778>
- Peranginangin, F. E., & Budiarti, R. (2024). Fungsi organisasi dalam memulihkan hak eks-tahanan politik 1965: Analisis dengan teori genealogi Michel Foucault. *Dengan*, 4(1), 463–474.
- Shuvaev, S., Amelchenko, E., Smagin, D., Kudryavtseva, N., Enikolopov, G., & Koulakov, A. (2023). A normative theory of social conflict. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 36, 45581–45601.
- Suryawan, I. N. (2019). Jelmane To To Dogen: Genealogi kekerasan dan perjuangan Bali. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 4(1), 20–30. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/public-inspiration/article/view/1274>